

NASIONALISME BURUH DALAM SEJARAH INDONESIA

Oleh

Dewi Yuliati

Pengajar Jurusan Sejarah

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

ABSTRACT

The state and the workers have close relationship, because the state is a political unity between the folks (includes the workers) and the government as the states' administrator. In the context of industrial relationship, there often takes place interest differences between the state and the workers, and this condition can rises conflict between these two parties. Generally, the workers are judged as the marginal party who struggle only for the economical reasons, without any thinking of political stability. This research shows that this point of view is not exactly true, because the workers really dare to search justice and prosperity for the folks. This research concludes that the workers movement can be the inspiration to strengthen the Indonesian nationalism.

Keywords: *labour nationalism, Sarekat Islam Semarang, Internationale*

A. PENDAHULUAN

Dalam penelitian ini buruh diartikan sebagai orang yang bekerja pada perusahaan baik swasta maupun pemerintah untuk memperoleh gaji atau upah. Secara harafiah buruh, menurut kamus Jawa Kuna-Indonesia (Zoetmulder dan Robson), sebuah kata yang berasal dari bahasa Jawa, berarti orang yang bekerja dengan memperoleh bayaran. Pada tahun 1954 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 31/1954 yang menegaskan bahwa buruh adalah tenaga kerja pada perusahaan swasta, sedang tenaga kerja pada pemerintah disebut

karyawan atau pegawai yang dibayar dengan Anggaran Belanja Negara, dan hubungan kerjanya bersifat publik. Peraturan pemerintah ini merupakan solusi terhadap perdebatan tentang istilah untuk menyebut pekerja, apakah buruh atau karyawan. Kelompok-kelompok dalam serikat pekerja yang memakai istilah buruh didukung oleh anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Kata buruh mempunyai arti yang dekat dengan konsep proletariat yang mengacu pada hubungan konflik antara para majikan dan pekerja. Dengan demikian, dalam istilah buruh tersirat ide tentang perjuangan kelas.

Sebaliknya, penggunaan istilah karyawan didukung oleh kelompok non-PKI dan kelompok militer. Istilah karyawan mengandung arti persatuan antara majikan, manajemen, dan pekerja. Hubungan antara manajemen dan pekerja bersifat kooperatif dan bebas dari konflik. Karyawan berasal dari bahasa Sanskrit yang digunakan untuk menyebut pekerja dengan penggunaan intelektual (Susetiwana, 2000:73-74; periksa juga Suroto, 1985:30).

Dalam percakapan sehari-hari buruh dapat dibedakan atas buruh kantor (karyawan yang bekerja di kantor), buruh kasar/kuli/*unskilled labour* (karyawan yang bekerja dengan tenaga badan), dan buruh terampil (karyawan yang mempunyai keterampilan tertentu seperti: tukang kayu, tukang jahit, tukang batu, juru ketik dan sebagainya) (Ensiklopedi Indonesia, 1980:557). Buruh dapat dibedakan juga atas dasar tingkat keterampilannya dalam suatu perusahaan, yaitu buruh terampil, buruh semi terampil, dan buruh tidak terampil. Pada umumnya tingkat keterampilan buruh tersebut menentukan sistem pengupahan. Buruh terampil dapat bekerja secara permanen, diberi upah secara bulanan, mendapat cuti tahunan, tunjangan sakit, mendapat upah lebih tinggi daripada buruh dengan tingkat keterampilan lebih rendah, pensiun, bonus tahunan, dan uang makan. Buruh semi terampil menerima upah yang dihitung sesuai dengan jumlah hari kerja, dan menerima jumlah tunjangan lebih

sedikit daripada tunjangan untuk buruh terampil. Biasanya buruh tidak terampil hanya dibayar untuk hari-hari ia bekerja (Ingleson, 1986:25).

Pada masa kolonial Belanda di Indonesia, terutama setelah ideologi komunisme melembaga dalam Partai Komunis Hindia pada tahun 1920, *conflict of interest* antara majikan dan buruh tampak secara nyata dalam khasanah pergerakan buruh (*labour movement*). Dalam memperjuangkan kepentingannya itu, pada umumnya kaum buruh harus menerima kekalahan, karena negara berada pada pihak perusahaan dengan alasan demi stabilitas politik dan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mengajukan tiga pertanyaan utama, yaitu: (1) Mengapa buruh bergerak untuk memperjuangkan perbaikan kondisi kerja? (2) Bagaimana negara bersikap dan bertindak dalam mengatasi pergerakan buruh? (3) Bagaimana hasil pergerakan buruh itu?

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah. Dengan demikian metode yang dipergunakan adalah metode historis yaitu mencari, menemukan, dan menguji sumber-sumber sehingga dapat diperoleh fakta sejarah yang otentik dan kredibel. Dalam penulisan dilakukan penyusunan fakta-fakta yang masih fragmentaris itu ke dalam suatu sintesa yang sistimatis, utuh, dan komunikatif. Untuk mencapai hasil penulisan sejarah yang demikian, diperlukan suatu penelitian yang tidak saja berangkat dari pertanyaan-

pertanyaan pokok tentang "apa, siapa, di mana, dan kapan", tetapi juga berdasar pada pertanyaan "bagaimana", "mengapa serta apa jadinya". Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan pokok adalah fakta sejarah serta unsur-unsur yang turut membentuk peristiwa di tempat dan pada waktu tertentu. Jawaban terhadap pertanyaan "bagaimana" merupakan rekonstruksi yang menjadikan semua unsur itu terkait dalam suatu deskripsi yang disebut sejarah. Jawaban terhadap pertanyaan "mengapa dan apa jadinya" akan menerangkan hubungan kausalitas.

Sumber-sumber diperoleh dari berbagai perpustakaan yaitu Perpustakaan Monumen Pers Surakarta, Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional Jakarta. Sumber –sumber tertulis yang diteliti adalah dokumen pemerintah, berbagai surat kabar di Jawa pada masa kolonial Belanda, dan tulisan-tulisan sezaman yang berkait dengan masalah-masalah perburuhan.

B. LATAR BELAKANG GERAKAN BURUH

Antara tahun 1910-1912 terjadi kenaikan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari Hindia Belanda (selanjutnya disebut Indonesia). Harga beras naik 30%, gula 9%, kentang 25%, kain katun 10%, minyak kelapa 6%, dan bambu 90%. Kenaikan harga barang-barang ini tidak disertai dengan kenaikan upah (*De*

Locomotief, 18 Maret 1913). Nilai upah buruh bumiputera yang sangat minimal (tidak lebih dari f. 1, - per hari) semakin tidak dapat untuk menjangkau kebutuhan pokok.

Memasuki Perang Dunia I, kehidupan ekonomi buruh semakin merosot. Ketika itu inflasi meningkat dan pengusaha Eropa mengeruk keuntungan besar karena kenaikan permintaan ekspor hasil-hasil perkebunan dari Indonesia. Sebaliknya nilai upah semakin menurun karena kenaikan harga barang-barang impor dan dengan sendirinya juga harga barang-barang dalam negeri, sedangkan upah tidak dinaikkan. Kondisi ini menjadi bagian latar belakang maraknya aksi mogok kaum buruh pada akhir dekade ke-2 sampai pertengahan dekade ke-3 abad ke-20.

Setelah Perang Dunia I berakhir, rakyat Jawa hidup dengan tingkat pendapatan yang sangat minimal. Yeekes menerangkan dalam *De Opbouw* (tahun 1923) bahwa pendapatan rata-rata per tahun buruh bumiputera adalah f. 196, -. Dari jumlah pendapatan itu masih harus ada yang dikeluarkan untuk membayar pajak, sehingga pendapatan rata-rata per bulan tinggal sekitar f. 13, - (Malaka, 2000:52).

Seorang tokoh pergerakan buruh, Tan Malaka, sangat meratapi kondisi kemiskinan buruh bumiputera itu. Ia mengungkapkan bahwa orang Jawa tinggal di pondok-pondok rombeng atau tidak bertempat tinggal sama sekali, kelaparan, berpakaian compang-camping, dan kesehatannya tidak terawat. Jika

terjadi wabah malaria, kolera, cacing tambang, dan sampar, ratusan ribu orang mati karena mereka tidak memiliki ketahanan tubuh untuk menghadapi serangan berbagai penyakit (*ibid.*). “Suatu keuletan yang patut dipuji” adalah ungkapan Tan Malaka untuk menggambarkan ketabahan dan kesabaran buruh Jawa dalam menghadapi berbagai kesulitan dan kekurangan itu.

Kesulitan ekonomi pada masa Perang Dunia I itu tercermin antara lain pada keluhan Perhimpoean Roro Jitno (perhimpunan pekerja partikulir) tentang dampak perang itu bagi kaum buruh.

Dari timboelnja perang itoe beberapa koeli di pabean soedah poelang ke roemahnja karena soedah tidak ada pekerdjaan jang moesti diangkatnja boeat mendapetken oeang pembeli isi peroet. Ada djoega mandor-mandor dan pegawei di toko atau maatschappij soedah dilepas dengan pesangon, tetapi tiada semoea toko berlakoe begitoe moerah. (*Sinar Djawa*, 27 Februari 1915).

Karena desakan kesulitan ekonomi itu, Perhimpoean Roro Jitno membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Centraal Comite Kesengsaraan di Batavia untuk meminta derma bagi orang-orang yang terkena pelepepasan hubungan kerja itu.

Jang taroh tanda tangan di bawah ini voorlopig hoofdbestuur dari Perhimpoean Roro Jitno atoer beri taoe bahwa pada waktoe jang amat soekar ini, jaitoe waktoe di Europa timboel perang besar, boekan di Europa sadja jang pendoedoeknja dapet sengsara, poen di Hindia

Nederland begitoe djoega. Perkataan sengsara ini artinja boekan orang jang terserang bahaya perang, tetapi sebab berhenti dari pekerdjaannja. Moelai boelan Agustus banjak mandoer berhenti dari pekerdjaannja, dan banjak toekang serta koeli tiada dapat pekerdjaan sebagaimana biasa. Lantaran itoe voorlopig hoofdbestuur Perhimpoean Roro Jitno mohon dengan sangat dan dengan hormat soepaja derma goena kesengsaraan di Hindia Nederland itoe segera dibagikan kepada orang-orang jang dapet sengsara terseboet. (*ibid.*)

Selain kesulitan untuk mendapat pekerjaan dan pelepasan hubungan kerja, kesengsaraan kaum buruh bumiputera masih diperberat oleh kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok sebagai akibat perang. Kenaikan harga barang-barang dalam masa dan sesudah perang itu disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Pertama, impor barang-barang kebutuhan pokok terhambat oleh ketiadaan kapal pengangkut, karena sejumlah besar kapal Belanda diperlukan oleh Inggris untuk kepentingan perang. Kedua, pada tahun 1917, Inggris melarang ekspor beras dari India dan Singapura ke Hindia Belanda. Dengan demikian persediaan bahan-bahan makanan menipis dan harga barang-barang kebutuhan naik. Periode pertengahan 1918 sampai 1920 merupakan masa kemerosotan ekonomi di Indonesia. Pada periode itu terjadi inflasi yang sangat tinggi. Semua harga barang kebutuhan hidup naik, sedangkan gaji atau upah tetap. Pada

pertengahan Agustus 1918 harga bahan-bahan makanan, pakaian, dan barang-barang keperluan rumah tangga naik lebih dari 50% (Larson, 1987:104). Ketiga, ekstensifikasi perkebunan-perkebunan dengan memanfaatkan peranan lurah untuk memaksa petani agar mau menyewakan tanahnya kepada pengusaha perkebunan. Para lurah terdorong untuk memaksa petani agar menyewakan tanahnya pada perkebunan,

karena mereka mendapat premi f. 2, 50, - untuk setiap bau (1 bau = 7096 m²) tanah petani yang disewakan (*Sinar Hindia*, 5 Mei 1918). Dengan demikian, areal perkebunan semakin meluas, dan areal penanaman padi semakin menyempit. Implikasi ekstensifikasi lahan tanaman ekspor ini adalah kecenderungan peningkatan ekspor produk-produk pertanian. Peningkatan ekspor ini dapat diperiksa dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1
Ekspor produk pertanian dari pelabuhan Semarang
Tahun 1906-1929(dalam ton)

Tahun	Gula	Tembakau	Kopi	Kapok
1906	183.593	10.530	1.939	3.042
1907	245.647	9.329	1.973	4.674
1908	238.852	11.831	1.532	3.384
1909	264.224	10.681	1.176	4.870
1910	243.096	10.498	1.639	4.526
1911	237.833	11.485	1.065	4.610
1912	312.928	17.062	1.343	4.722
1913	294.894	17.307	1.909	4.082
1914	328.379	14.899	805	5.352
1915	258.666	18.108	1.173	6.684
1916	369.196	17.015	725	5.704
1917	252.981	1.502	857	7.472
1918	356.181	508	427	5.686
1919	488.300	31.523	6.688	10.043
1920	378.294	14.224	1.327	8.379
1921	491.406	8.776	1.342	11.215
1922	325.660	10.039	2.623	9.661
1923	478.249	10.122	578	8.129
1924	463.805	13.475	2.214	9.877
1925	535.117	13.545	1.514	9.529
1926	397.197	13.335	1.445	9.925
1927	521.613	12.730	1.136	10.243
1928	650.516	12.510	3.860	10.861
1929	620.828	11.330	2.676	9.313

Sumber: Theo Stevens, “De Ontwikkeling van Semarang Als Koloniale Uitvoerhaven van Midden-Java Sinds 1900 en Zijn Tegenwoordige Betekenis” dalam Francien van Anrooij dkk. (ed.), *Between People and Statistics Essays on Modern Indonesian History* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1979), hlm. 93.

Harga beras terus membumbung tinggi. Pada Februari 1918 harga beras nomor satu mencapai f. 14 per pikul atau 22, 7 sen per kg, beras nomor dua f. 13 per pikul atau 21 sen per kg (Ket: satu pikul = 61, 76 kg, Liem Thian Joe, 1931:237). Tahun 1919 harga ini naik lagi. Beras nomor satu berharga f. 16 per pikul, beras nomor dua f. 15 per pikul, dan beras nomor tiga f. 14 per pikul (*Sinar Hindia*, 14 Januari 1919). Demikian juga, harga gula mencapai f. 16 per pikul atau f. 0, 26 per kg (Liem Thian Joe, 1931:234). Bagi kaum buruh bumiputera yang berpenghasilan hanya sekitar f. 0, 50, - per hari, harga beras dan gula yang demikian tinggi tentu menjadi beban hidup yang sangat berat (*Sinar Hindia*, 20 Februari 1920).

Tan Malaka menggambarkan jutaan kaum pekerja atau buruh

bumiputera pada waktu itu sebagai budak belian kolonial yang sangat tertindas oleh upah yang hanya dapat mencukupi kebutuhan untuk tidak mati kelaparan. Buruh kereta api, trem, dan buruh-buruh lainnya mulai bekerja dengan gaji sekitar f. 15, - dan mencapai maksimum f. 30, - sampai f. 40, - sebulan ketika mereka sudah beruban. Tan Malaka menilai jumlah gaji itu terlalu sedikit di zaman kapitalisme, dan kondisi ini sangat menyedihkan, jika mengingat bahwa pada pekerjaan dan tanggung jawab kaum buruh telah bergantung hidup beribu-ribu manusia (Tan Malaka, 2000:49).

Gejala kemerosotan ekonomi ini diiringi dengan penurunan tingkat kesehatan rakyat. Sebagai contoh, pada tahun 1917 penduduk Kota Semarang terlanda wabah pes yang berakibat kematian beratus-ratus orang.

Tabel 2
Angka Kematian Penduduk Semarang per 1000 jiwa
(tahun 1917)

Nama Kampung	Triwulan Pertama	Triwulan Ke dua
Semarang Kulon	48	67
Semarang Kidul	32	57
Semarang Wetan	59	72
Semarang Tengah	45	49
Genuk	24	64
Pedurungan	26	90
Srondol	13	23
Mranggen	26	151
Kranggan	24	115
Gedongbatu	20	98

Sumber: Darsono, “Giftige Waarheidspijlen” dalam *Sinar Hindia* 18 Mei 1918.

Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor kemiskinan yaitu kekurangan makanan yang bergizi, pemeliharaan kesehatan masyarakat oleh pemerintah kolonial Belanda, kondisi pemukiman yang sangat buruk (rumah terbuat dari bambu dan rumbia, tidak ada ventilasi yang memadai, berjejal-jejal di tanah yang sempit dan becek).

Kekurangan dan kenaikan harga beras serta barang-barang kebutuhan lainnya mendorong kaum buruh untuk melakukan usaha perbaikan nasib. Usaha-usaha perbaikan penghidupan itu sering dirumuskan oleh organisasi politik. Menyadari hal itu, Residen Semarang menyatakan bahwa Sarekat Islam Semarang berperan sebagai perantara antara kaum buruh dan majikan atau berperan dalam merumuskan tuntutan yang diajukan (*Algemeen Verslag* Residen Semarang, 1918).

Dalam menyikapi kenaikan harga beras itu, Sarekat Islam Semarang, yang bergerak dengan ideologi Marxis, menggelar rapat umum pada tanggal 10 Februari 1918 di *Stadstuin* (alun-alun) Semarang yang dihadiri oleh pengurus-pengurus cabang dan 3000 anggota. Dalam rapat itu Sarekat Islam Semarang memutuskan untuk menyampaikan surat kepada gubernur jenderal yang berisi tuntutan penurunan harga beras. Berikut

ini ditampilkan tuntutan-tuntutan yang dirumuskan oleh Sarekat Islam Semarang.

- ”a. Membatesi harganja beras kloearan tanah Djawa f. 10, - satoe pikoel boeat jang No. 1 dan jang nomer lainnja diberi bates djuga jang seimbang dengan itoe.
- b. Harga beras dari sabrang f. 9, - satoe pikoel jang No. 1 dan nomer lainnja toeroen jang berimbang dengan ini harga djuga.
- c. Membeslag beras jang di goedang goedang besar, mendjoeal beras itoe pada rakjat dan pada soedagar-soedagar beras jang modalnja ketjil jang berdjoealan di pasar atau di kampoeng-kampoeng. Pendjoealan mesti diamati djangan sampai menghargai lebih dari permintaan di atas.
- d. Mengoerangi banjaknja tegalan teboe, tembako, thee dan koofie jang diboeat menanam hatsil boeat dikirim ke negeri loear Hindia.
- e. Meloeaskan sawah-sawah padi, tegalan djagoeng dan polo-widjo jang hatsilnja boeat dimakan rakjat Hindia sendiri.”

Surat yang ditandatangani oleh Semaoen (ketua Sarekat Islam Semarang) dan Kadarisman (sekretaris) itu disiarkan dalam harian *Sinar Djawa* 12 Februari 1918, dan kepada Centraal Sarekat Islam (CSI) serta Sarekat Islam Lokal yang lain dihimbau untuk membahas juga masalah kemahalan beras ini (*Sinar Djawa*, 12 Februari 1918).

C. PROPAGANDA MARXISME-KOMUNISME

Kemerosotan kondisi ekonomi rakyat, termasuk kaum buruh, mendorong kaum Marxis yang tergabung dalam Vereniging van Spoor en Tramweg Personeel (VSTP) dan Indische Sociaal-Democratische Vereniging (ISDV) untuk merekrut simpati buruh bumiputera dengan menyelenggarakan rapat umum pada tanggal 17 Februari 1918 di *Stadstuin* (alun-alun kota) di Semarang. Rapat yang membicarakan kemahalan harga beras ini dikunjungi oleh kira-kira 7000 orang dari berbagai bangsa yaitu Indonesia, Cina, dan Eropa. Orang-orang yang tampil sebagai pembicara dalam rapat umum tersebut adalah Van Burink (berpidato dalam bahasa Belanda), Darsono (dalam bahasa Melayu), Baars (dalam bahasa Belanda), Sneevliet dan Semaoen (dalam bahasa Melayu). Mereka mendesak pemerintah kolonial untuk segera menurunkan harga beras (Liem Thian Tjoe, 1931:237-238). Bagi kaum Marxis, kemerosotan ekonomi ini merupakan akses yang bagus untuk mengobarkan spirit perjuangan kelas buruh demi penghancuran kapitalisme.

Kemerosotan ekonomi di Indonesia setelah Perang Dunia I itu berjalan seiring dengan meluasnya pengaruh komunisme internasional. Komintern, suatu organisasi komunisme internasional yang berpusat di Uni Soviet, dibentuk pada tahun 1919.

Organisasi ini berkepentingan untuk menyebarkan komunisme (Marxisme-Leninisme) di negara-negara berkembang di seluruh dunia yaitu negara-negara yang terjajah di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan yang dieksploitasi oleh kekuasaan kapitalis Eropa dan Amerika Serikat (McVey, 1965:1).

Berkaitan dengan kepentingan untuk menggerakkan kaum buruh di wilayah-wilayah jajahan, sangat menarik untuk diperhatikan deklarasi Zinoviev tentang persoalan kolonial dalam kongres III Komintern berikut ini.

Komunis Internasional telah membuat keputusan untuk mengembangkan prinsip-prinsip pergerakan buruh, prinsip-prinsip pergerakan Komunis, di seluruh bangsa yang terjajah di seluruh daerah jajahan. Ini adalah tugas pertama Komunis Internasional. Akan tetapi, pada saat yang sama, Komunis Internasional juga memutuskan untuk mendukung pergerakan revolutioner rakyat yang terjajah di daerah-daerah jajahan dalam melawan imperialisme, karena Komunis Internasional meyakini bahwa kemenangan revolusi proletariat akan membebaskan bangsa yang terjajah. Slogan kami adalah: Kaum proletar di seluruh dunia, anda harus bersatu untuk melawan imperialisme, demi Komunisme (*Ibid.*: 131, terjemahan oleh Dewi Yuliati).

Berdasarkan pada deklarasi yang telah disepakati dalam kongres itu, kerja sama dengan nasionalisme menjadi

strategi Komintern untuk meluaskan pengaruhnya ke daerah-daerah jajahan. Slogan anti imperialisme dan kapitalisme mendapatkan titik temu dalam masyarakat terjajah. Propaganda komunisme dilancarkan melalui berbagai media: rapat, pidato-pidato, surat kabar, novel, dan nyanyian.

Satu media propaganda yang efektif untuk menarik perhatian umum adalah kesenian. Nyanyian merupakan salah satu bidang kesenian yang menjadi medium propaganda yang efektif, karena lebih mudah diajarkan, dapat dinyanyikan secara bersama-sama, dapat membangkitkan emosi, serta bersifat menghibur. Suatu nyanyian yang menjadi medium propaganda Komintern adalah *Internationale*. Nyanyian ini diciptakan untuk memperingati hari terbentuknya Internationale (asosiasi buruh internasional) pada tanggal 1 Mei tahun 1864. Syair nyanyian Internationale ditulis dalam bahasa Jerman, kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa yaitu Belanda, Perancis, Inggris, Spanyol, Itali, Portugis, Denmark, Norwegia, Swedia, Rusia, Turki, dan Melayu. Penerjemah syair lagu tersebut dalam bahasa Melayu adalah Soewardi Suryaningrat (*Sinar Hindia*, 5 Mei 1920). Di bawah ini disajikan terjemahan nyanyian *Internationale* tersebut.

Bangoenlah bangsa jang terhina!

Bangoenlah kamoe jang lapar!
Kehendak jang moelia dalam doenia
Senantiasaa tambah besar
Lenjaplah adat pikiran toea!
Hamba rakjat sadar, sadar!
Doenia telah berganti roepa
Nafsoelah soedah tersebar!
Kawan, kawan, hai ingatlah!
Ajo majoe berperang!
Serikat Internationale, jalah pertalian orang!

Negri ditindas, hoekoem berdjoesta
Jang kaja teroes hidoep seneng
Orang miskin terisap darahnja
Tak sekali berhak orang
Djangan soeka lagi terperintah!
Ingat akan persamaan
Wadjib dan hak tiada berpisah
Hak dan wadjib haroes sepadan
Kawan, kawan, hai ingatlah!
Ajo madjoe berperang!
Serikat Internationale, jalah pertalian orang.

Lagu *Internationale* ini harus dinyanyikan dalam rapat-rapat organisasi-organisasi buruh, dan menjadi lagu wajib yang harus dinyanyikan oleh siswa-siswa sekolah Sarekat Islam, ketika mereka bertugas mencari sumbangan untuk biaya operasional sekolah itu. Lagu yang dapat membangkitkan spirit anti kapitalisme dan imperialisme ini sangat diwaspadai oleh pemerintah kolonial, karena disebarluaskan melalui media yang sangat efektif yaitu surat kabar dan rapat-rapat umum. Penasehat Urusan Bumiputera, R.A. Kern, menghimbau kepada pemerintah kolonial agar mewaspadainya, karena lagu itu menjadi nyanyian wajib

untuk membuka dan menutup setiap rapat (lihat Laporan Penasehat Untuk Urusan Bumiputera tentang Kongres PKI ke-9 di Batavia, 7-10 Juni 1924, dalam Mr. 1924 No. 501 x).

Tanggal 1 Mei 1924 merupakan momentum penting bagi kaum Marxis-komunis untuk menguatkan kesadaran kelas buruh melalui penyelenggaraan perayaan hari buruh internasional. Perayaan diselenggarakan di gedung Sarekat Islam Semarang di Kampung Gendong. Dua gapura yang berwarna merah tampak berdiri di antara Jalan Ambengan dan Gedung Sarekat Islam. Kanan dan kiri jalan menuju gedung dihiasi dengan “pelita seribu”. Perayaan dimulai pada pukul 07.45 dengan pidato pembukaan oleh Soegono. Untuk menutup pidatonya, Soegono menyerukan “kaoem boeroeh seloroeh doenia bersatoelah!”. Kemudian, tampil juga Darsono untuk berpidato dengan penuh semangat komunis. Di belakang Darsono berdiri 9 orang pemuda yang membawa foto-foto Karl Marx, Lenin, Liebknecht, Rosa Luxemburg, Sneevliet, Semaoen, dan Tan Malaka. Gambar palu arit pada setiap dada pemuda-pemuda itu semakin memantapkan diri mereka sebagai pendukung komunisme. Darsono menerangkan bahwa atas jasa-jasa para pemimpin tersebut, kaum buruh dari segala bangsa dan agama bersatu di bawah

bendera merah untuk melawan kapitalisme internasional, guna mendatangkan zaman baru, zaman persamaan, zaman persaudaraan, kemerdekaan dan kemakmuran atau zaman komunisme. Secara serentak para tamu menyambutnya dengan seruan “hidup komunisme” dan “hidup Soviet”. Selain dengan pidato-pidato, perayaan itu juga disemarakkan dengan orkes dan sandiwara. Perayaan yang berlangsung sampai pukul 12 malam itu ditutup dengan lagu Internationale yang dinyanyikan dengan penuh gembira (*Sinar Hindia*, 2 Mei 1924).

D. PEMOGOKAN BURUH

Frustrasi buruh yang sudah demikian berat, yang kemudian ditambah dengan propaganda Marxisme-komunisme yang tampak membela kepentingan buruh, memunculkan tindakan agresif buruh yang berbentuk pemogokan di berbagai perusahaan.

1. Pemogokan Buruh Pegadaian

Pada awal abad ke-20, di Semarang telah ada empat kantor pegadaian yaitu di Mlaten, Poncol, Depok, dan Karang Turi. Pada tanggal 21 Januari 1922, pegawai-pegawai bumiputera di kantor-kantor pegadaian itu melakukan pemogokan. Jika pada umumnya aksi pemogokan buruh didasari oleh kekecewaan terhadap

kegagalan tuntutan perbaikan gaji dan syarat-syarat pekerjaan yang lain, pemogokan pegawai pegadaian itu dipicu oleh persoalan harga diri.

Sehari sebelum terjadi pemogokan, ada seorang pegawai pegadaian Karang Turi yang diperintah oleh *beheerder* (Kepala Pegadaian) untuk mengangkat barang-barang ke tempat pelelangan. Pegawai tersebut menolak, tetapi *beheerder* menetapkan bahwa barang-barang harus diangkat sendiri oleh pegawai itu. Kemudian perselisihan ini merupakan faktor pemicu pecahnya pemogokan di kantor-kantor pegadaian di kota Semarang (Liem Thian Joe, 1931:258).

Kesadaran akan harga diri tampak semakin mengkristal dalam "*openbare protest vergadering* pemogokan dalam doenia pegadean" pada tanggal 22 Januari 1922 di kantor Sarekat Islam Semarang di Kampung Gendong. Dalam rapat yang dihadiri oleh sekitar 5000 orang itu, Tan Malaka menunjukkan sikap orang Belanda yang sangat melecehkan orang bumiputera sebagai berikut.

Orang-orang Belanda jang datang di sini, meskipoen di sana mereka hanja djadi toekang menggosok sepatoe sadja, di sini djadi zinder sadja tidak soeka mengangkat barang sedikit sadja. Djika mengangkat barang jang berat sedikit minta pertoeoengannja djongos, baboe, koki. Begitoe poen njonjah-njonjah besarnja, anak-

anaknja jang masih ketjil sadja djoega telah dididik panggil djongos, baboe, koki. Boleh djadi anaknja jang masih dalam kandoengan iboenja telah diadjarkan adat itoe (*Sinar Hindia*, 23 Januari 1922).

Penolakan pegawai pegadaian terhadap perintah atasannya itu bukanlah tanpa dasar. Pada tahun 1919 telah dikeluarkan peraturan bahwa pengangkatan barang-barang ke tempat pelelangan dapat dilakukan oleh tukang kebun (*Sinar Hindia*, 16 Januari 1922). Namun demikian, karena pemerintah memberlakukan penghematan belanja negara, banyak kuli yang bertugas mengangkat barang-barang lelangan dipecat, dan tugas mereka dibebankan kepada para pegawai administratif. Ketika *beheerder* (kepala pegadaian) mengharuskan seorang pegawai untuk mengangkat sendiri barang-barang itu ke tempat pelelangan, sangatlah wajar jika timbul penolakan.

Selain persoalan harga diri, tampaknya pemogokan pegawai pegadaian di Semarang juga didorong semangat solidaritas terhadap pegawai pegadaian Ngupasan Yogyakarta yang telah melancarkan pemogokan sejak tanggal 11 sampai 18 Januari 1922 dengan faktor pemicu yang sama, yaitu perintah *beheerder* terhadap seorang pegawai untuk mengangkat sendiri barang-barang yang

akan dilelang. Karena perintah tersebut ditolak oleh pegawai yang mendapat tugas itu, terjadilah perselisihan yang mendorong terjadinya pemogokan umum di kantor-kantor pegadaian. Revolutionaire Vakcentrale Semarang turut berperan dalam menyebarluaskan anjurannya bagi seluruh kaum buruh di Hindia agar memberikan dukungan bagi kaum pemogok, baik berupa uang maupun lainnya (*Sinar Hindia*, 24 Januari 1922). Dalam surat kabar *Sinar Hindia* diberitakan bahwa pemogokan terjadi di 75 kantor pegadaian di Jawa, termasuk pegadaian Karangturi, Poncol, dan Depok di Semarang (*Sinar Hindia*, 21 Januari 1922). Melalui harian *Sinar Hindia*, tanggal 23 dan 24 Januari 1922, disiarkan suatu iklan lowongan pekerjaan di pegadaian yang sangat sarkastis sebagai berikut.

Awat, awat perloe amat penting.
Haroes dibatja!

Diminta beberapa orang
boemipoetera oentoek reserve
beambte pegadean, baik jang
beloem dapat examen, maoepoen
jang telah loeloes dalam examen
pegadean, goena mengganti
pemogok-pemogok dalam doenia
pegadean dengan perdjandjian:
Bekerdja betoel dan jang radjin,
tidak boleh salah, kalau salah akan
dapat oesiran seperti andjing.
Haroes tidak mempoenjai maloe,
lebih disoekai jang pendjilat, jang
rendah adat istiadatnja, soeka dan
koeat mengangkati gamelan, pot
kentjing dan boeang air, dandang,
kendil, koewali, kentjeng dari

tembaga, patjoel, linggis, petjok,
dan lain-lain, dan roepa-roepa
barang kuningin.

Penglamar lekas diterima jang
dalam permintaannja itoe
diterangkan soeka bekerdja selakoe
boedak. Permintaan dengan soerat,
bitjara atau telefoon pada
Hoofdagent besar Pendjilat.

Pemogokan ini tidak berlangsung lama, karena pemerintah kolonial memberikan ancaman pemecatan bagi siapa saja yang melaksanakan pemogokan, dan dengan ancaman itu ternyata banyak kaum pemogok yang menjadi *onderkruiper* (orang yang masuk secara diam-diam) (*Sinar Hindia*, 24 Januari 1922). Keamanan *onderkruiper* itu terjamin, karena pemerintah segera menugaskan polisi bersenjata untuk menjaga semua kantor pegadaian, dan melindungi orang-orang yang bersedia bekerja kembali (Dewi Yuliati, *op.cit.*: 173-178).

2. Pemogokan Buruh Kereta Api

Setelah kegagalan pemogokan buruh pegadaian di Pegadaian Ngupasan di Jogjakarta pada Januari 1922, kekuatan dalam pergerakan buruh di Semarang melemah. Tan Malaka dan P. Bergsma diasingkan ke Belanda atas tuduhan memimpin pemogokan buruh pegadaian di Pegadaian Ngupasan Yogyakarta, dan Semaoen pergi ke Rusia pada Oktober 1921 untuk menghadiri kongres buruh

Timur Jauh di Moskow yang dimulai pada 11 November 1921. Dalam kongres tersebut dibahas persoalan-persoalan organisasi buruh komunis internasional di daerah-daerah jajahan (Blumberger, *op.cit.*: 141).

Pada tanggal 24 Mei 1922 Semaoen pulang ke Semarang, dan ketika itu ia telah menghadapi kenyataan bahwa pergerakan buruh di kota itu melemah. Ia merasa perlu untuk menghidupkan kembali pergerakan buruh revolusioner. Ia berpendapat bahwa serikat-serikat buruh harus dipersatukan kembali dalam suatu organisasi yang baru.

Pada tanggal 25 Juni 1922 Semaoen menyelenggarakan rapat untuk serikat-serikat buruh, terutama serikat buruh yang berafiliasi pada Partai Komunis Hindia (PKI). Dalam rapat tersebut dibicarakan terutama mengenai perlunya diadakan fusi antara PPKB (Vakcentrale) dan Revolutionaire Vakcentrale. Rencana penyatuan kembali kedua organisasi itu dapat terlaksana pada tanggal 3 September 1922 dalam suatu rapat di Madiun. Tujuan pelaksanaan fusi adalah untuk menggalang persatuan guna melawan kapitalisme. Federasi serikat yang baru ini diberi nama "Persatoean Vakbonden Hindia" (PVH). Beberapa serikat buruh yang tergabung dalam PVH adalah Persatoean Pegawai Pegadean Boemipotera (PPPB), Persatuan Goeroe

Hindia Belanda (PGHB), Persatoean Goeroe Bantoe, VSTP, Personeel Fabriek Bond (PFB). Jumlah anggota PVH mencapai 20.000 orang (*ibid*: 141-142).

Krisis dunia sejak pertengahan 1922 semakin menghimpit kehidupan kaum buruh. Berbagai perusahaan melaksanakan penghematan dengan menghapuskan tunjangan kemahalan, dan masih disusul dengan tindakan-tindakan penghematan yang lain yaitu: menganjurkan para pegawai agar mengundurkan diri dengan pesangon; mulai Januari 1923 tunjangan tahunan diturunkan 50%; menaikkan harga sewa perumahan pegawai dari 10% gaji menjadi 15% gaji; menghapuskan tunjangan perumahan; menurunkan gaji permulaan dan tunjangan jabatan; pakaian dinas hanya diberikan sekali, selanjutnya pegawai harus mengeluarkan biaya sendiri; penghapusan segala tambahan gaji; penurunan jumlah uang lembur (lihat Arsip NIS Nr. 400 dalam Ingleson, *op.cit.*: 228-229).

Dalam menanggapi pengaturan-pengaturan yang semakin menyulitkan perekonomian kaum buruh itu, pada hari Natal tahun 1922, PVH mengadakan rapat di Semarang. Dalam rapat ini Semaoen melihat kaum buruh sudah sedemikian resah. Oleh karena itu pada Januari 1923 selaku pimpinan VSTP Semaoen membuat surat edaran yang berisi usulan bagi kaum

buruh kereta api untuk melaksanakan pemogokan, jika tunjangan kemahalan dihapus. Usulan ini dibicarakan lagi dalam rapat VSTP pada awal Februari 1923. Dalam rapat itu Semaoen juga memperingatkan direksi perusahaan kereta api dan tram, agar “jangan main api”.

Pada tanggal 12 April 1923 Semaoen menemui pimpinan Staatsspoor untuk membicarakan hal-hal sebagai berikut: (1) tetap memberikan tunjangan kemahalan bagi para buruh, (2) jumlah jam kerja 8 jam per hari, (3) pembentukan dewan pendamai (*verzoeningsraad*), (4) memberikan upah minimum f. 1, - per hari (Surat Edaran VSTP, 23 April 1923).

Pembicaraan antara Semaoen dan pimpinan Staatsspoor tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan oleh kaum buruh. Semua tuntutan tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan (*Sinar Hindia*, 5 Mei 1923). Kegagalan dalam perundingan dengan pimpinan perusahaan itu menjadi agenda utama pada rapat VSTP yang diselenggarakan pada hari Selasa, 30 April 1923 yang dipimpin oleh Kadarisman. Menurut Kadarisman usulan mereka ditolak oleh perusahaan dengan alasan bahwa belum ada pegawai yang kekurangan makan hingga mati, bahkan para pegawai tampak gemuk-gemuk dan sehat-sehat. Jawaban yang menggelikan dan mengecewakan ini mendorong mereka untuk bergerak secara bersama-sama. Jika

masih ada yang mau bekerja, itu berarti makan darah saudara sendiri (lihat Laporan Mantri Politie Gew. Recherche, 1 Mei 1923).

Akhirnya Semaoen memutuskan untuk menyerukan aksi mogok bagi seluruh pegawai kereta api di Semarang. Pada tanggal 29-30 April 1923 PVH menyelenggarakan rapat di Surabaya. Dalam rapat tersebut pengurus VSTP (Semaoen, Kadarisman, Soegono, dan Soedibjo) mengumumkan *manifest* (pernyataan umum) bahwa jika pemogokan terjadi, Semaoen akan diangkat sebagai diktator VSTP, dan pemogokan umum harus dilancarkan segera setelah Semaoen ditangkap. Selanjutnya, Semaoen menyatakan bahwa ia tidak merasa takut dengan ancaman bui dan pembuangan dari pemerintah demi memperjuangkan kepentingan pegawai spoor dan tram (lihat Surat Gubernur Jenderal Fock kepada Menteri Daerah Jajahan De Graaff, 16 Mei 1923. Vb. 14 Juli 1923 No. 15). Pengumuman pengurus VSTP tentang pengangkatan Semaoen sebagai diktator VSTP dapat disimak dalam kutipan di bawah ini.

“Djika sewaktoe-waktoe ada pemogokan pegaweï Spoor dan Tram, maka:

- a. karena dalem saat pemogokan perlawanan memaksa mengadakan organisatie jang kentjeng dan tjepet komandonja

- (perintah jang tertinggi dari kepala gerak),
- b. karena dalem saat itoe semoea lid hoofdbestuur kerdja sebagai pegawei V.S.T.P. biasa,

memotoeslah:
dalem hal ada pemogokan besar atu ketjil, hoofdbestuur mengangkat voorzitter soedara Semaoen sebagai dictator V.S.T.P. dalem gerak dan koempoelannja, serta menjerahkan semoea tanggoengdjawab dan pimpinan pada soedara Semaoen terseboet, sedeng lid lid hoofdbestuur akan menoeroet padanja oentoek disoeroeh mengatoer dan membela semoea pegawei Spoor dan Tram di Hindia.

Soedara-soedara pegawei Spoor dan Tram di Hindia, ketahoeilah pentingnja poatoesan ini. Tanggal 19 ini atas nama pemerintah toean resident Semarang soedah mengantjam Semaoen dengan pemboeangan, tetapi meskipoen begitoe soedara Semaoen maoe bela teroes keperloeannja pegawei Spoor dan Tram dengan tiada was atau ketjil hati. Boei dan boeang tidak dianggep berat, sebab hidoepnja kaoem boeroeh jang mlarat seperti djoega hidoep dalem boei atau boeangan.
Ambillah tjonto ketetapan hati dari soedara Semoean terseboet, hei soedara-soedara Spoor dan Tram!”
(Surat edaran VSTP, *SANGET PENTING*, 23 April 1923)

Karena pernyataan di depan umum itu, pada tanggal 8 Mei 1923 Semaoen yang pada saat itu menumpang di kantor PKI di Tegal Wareng, ditangkap dan ditahan di penjara di alun-alun Semarang

dengan tuduhan *spreuk-delict* (pelanggaran terhadap ketentuan membuat pernyataan secara lisan di depan umum). Ia tidak mempunyai kesempatan untuk berbicara dengan istrinya yang ketika itu sedang melahirkan.

Pada hari itu juga, kaum buruh kereta api di Semarang menyelenggarakan rapat di gedung Sarekat Islam di kampung Gendong untuk memproklamasikan bahwa sejak saat itu pemogokan harus dimulai. Ajakan mogok juga disiarkan melalui harian milik Sarekat Islam Semarang, *Sinar Hindia*, sebagai berikut.

Hai kaoem proletar! Atoerlah dengan sigera barisan kita. Lemparlah si chianat kapitalisten. Pemoeda Hindia! Djanganlah mendjadi pengetjoet pemogokan. Pimpinlah bangsamu jang tertindas.

Pemogokan spoor dan tram mesti terdjadi, manakala permintaan tidak ditoeroeti, ataoepoen pemimpin diboeang. Awaslah hai kawan-kawan akan signal pemogokan.

Kaoem spoor-an! Mogok sadjalah kapan pemimpinmoed ditangkap! Apabila toean-toean tinggal diam, tjelakalah nasib toean di belakang hari (*Sinar Hindia*, 8 Mei 1923; lihat juga Liem Thian Joe, 1931:259).

Meskipun seruan untuk mogok disebarluaskan, pimpinan VSTP, yang diwakili oleh Soegono, tetap menganjurkan agar pemogokan jangan sampai menimbulkan kerusakan. Anjuran

itu dapat disimak dalam maklumat VSTP berikut ini.

Oleh karena nasib djelek, permintaan tidak dikaboelkan dan soedara voorzitter Semaoen ditangkap dan dimasoekkan boei, maka pegawei Spoor dan Tram di kota Semarang djadi marah dan laloe mogok.

Semoea personeel mogok.

Tram di kota tidak djalan.

Machinist Spoor N.I.S. mogok.

Pegawei Spoor dan Tram soedah marah dan mogok. Semoea marah dan semoea mogok sebab dipaksa oleh directie Spoor dan Tram dan soedara Semaoen dimasoekkan boei.

Orang marah sering djadi loepa, sebab itoe awas soedara-soedara, kita semoea mesti djaga djangan sampai di sini ada kedjadian spoor toemboekan. Soedara-soedara! Ati-ati djangan bikin gadoeh. Djangan bikin keroesakan. Tinggal di roemah sadja. Toendjoekkan kepada moesoeh kita, bahwa kita boemipoetera tahoe kemanoesiaan. Tetapi reactie bisa bikin gadoeh. Reactie bisa bikin soepaja Spoor tergoeling. Sebab reactie tidak soeka melihat kita berkelakoean sebagai manoesia. Dari itoe djagalah djangan ada ketjilakaan, djagalah djangan sampei reactie bisa bikin onar. Tinggal diam sadja di roemah soedara-soedara (Makloemat VTSP, 1923).

Pada tanggal 9 Mei 1923, pecahlah pemogokan umum di kota Semarang. Pemogokan tidak hanya dilakukan oleh pegawai kereta api, tetapi juga oleh berbagai pekerja di kota ini: tram kota Jomblang-Bulu, bengkel kereta api Semarang-Juana, pegawai-pegawai

bumiputera, pedagang-pedagang di pasar Johar dan Pedamaran, dan tukang-tukang sado. Suasana kota menjadi sangat sepi dan mobilitas macet. Para jongos dan babu yang biasa mengirim makanan untuk majikan mereka di kantor-kantor terpaksa harus berjalan kaki. Kereta api NIS, SJS, dan SCS tidak dapat beroperasi, karena masinis, *stoker* (petugas menyalakan api), kondektur dan pegawai-pegawai bumiputera yang lain ikut mogok. Untuk melancarkan kembali perhubungan dalam kota, tram kota dijalankan oleh tenaga bantuan dari siswa-siswa bangsa Belanda Technische School (Sekolah Teknik) di Semarang. Setiap gerbong tram kota itu dijaga oleh polisi. Demikian juga stasiun-stasiun NIS, SJS, dan SCS dijaga oleh polisi bersenjata. Pemogokan buruh kereta api ini mengundang solidaritas para pekerja di sektor-sektor yang lain. Pada keesokan harinya, tanggal 10 Mei 1923, menyusul aksi pemogokan pedagang-pedagang di pasar Dargo, Peterongan, Karangbidara, dan kusir-kusir dokar (Liem Thian Joe, 1931:260-261).

Seruan pemogokan buruh kereta api itu ternyata tidak hanya mendapat sambutan di Semarang, tetapi juga menggerakkan solidaritas kaum buruh kereta api di berbagai tempat. Para buruh kereta api di stasiun Weleri, Pekalongan, Tegal, Cirebon, Kertosono, Madiun, dan Surabaya juga ikut mogok (*ibid.* lihat juga

Blumberger, *op.cit.* 144 dan Ingleson, *op.cit.* 240).

Satu hal yang menarik perhatian adalah bahwa pemogokan tersebut dilakukan pada saat puasa Ramadan. Perjuangan Nabi Muhammad dalam berpuasa Ramadan dijadikan teladan untuk melawan segala kejahatan, dan untuk merayakan kemenangannya pada akhir bulan. Dalam konteks pergerakan buruh pada saat itu, kapitalisme dianggap sebagai kejahatan (*zondig kapitalisme*). Bulan Ramadan merupakan saat yang baik untuk perjuangan melawan kapitalisme yang jahat, dan kaum buruh boleh merayakan kemenangan jika mereka berhasil dalam perjuangan itu (*Sinar Hindia*, 12 Mei 1923).

Konsolidasi untuk memperkuat pertahanan pemogokan terus dilakukan. Pada tanggal 10 Mei 1923 diadakan rapat lagi yang dipimpin oleh Soemantri. Rapat tersebut dihadiri wakil-wakil VSTP, PKI, PVH, Pasarbond, Kleermakerbond, Nationaal Indische Partij (NIP), Gemeentebond, dan Dokarbond. Dalam rapat itu Darsono memberi anjuran-anjuran dan menguatkan semangat kaum pemogok. Untuk memperkuat spirit pemogokan, pengurus VSTP kembali mengeluarkan selebaran sebagai berikut.

Djangan toendoek kepala!! Awas, awas!! Madjoe teroes!! Djangan moendoer!!

Pemogokan di Kota Semarang bagoes amat. Spoor N.I.S. brenti. Tram S.C.S.brenti. Tram S.J.S. toeroet brenti djoega. Tjoema satoe doea sadja jang djalan, jaitoe jang didjalankan oleh kaoem pengetjoet. Pasar mogok, pintoenja ditoetoep oentoek protest dan menoenndjoekkan keroekoenannja dengan kaoem pemogok spoor dan tram.

Chauffeur taxi toeroet mogok djoega, sedang toekang-toekang dokar ini hari toeroet mogok djoega.

Kaoem boeroeh spoor dan tram minta tambah baiknja nasib, minta hidoep setjara manoesia. Tetapi pada vergaderingnja kemarin loesa malam di kantor SI Gendong vergadering itoe didjaga oleh polisi dengan memikoel bedil. Kaoem boeroeh minta hidoep selamat, apakah perloenja ia ditoendjoek-toendjoeki bedil itoe? (*Centrale Leiding van De Spoor en Tramweg Staking in Nederlandsch-Indië* Semarang, 10 Mei 1923)

Karena pemogokan buruh kereta api yang berpusat di Semarang ini telah mengakibatkan pemogokan di berbagai sektor ekonomi, pemerintah kolonial tidak tinggal diam. Pemerintah segera melakukan campur tangan untuk menindas gerakan buruh itu. Pemberlakuan pasal 161 bis membuat kaum pemogok tak berdaya lagi. Harapan untuk mencapai kemenangan pemogokan setelah menjalankan puasa Ramadhan telah sirna sebelum hari raya tiba. Pemogokan pun berakhir pada akhir Mei (Blumberger, *op.cit.* 144). Akhirnya, pengurus pusat

VSTP harus mengumumkan kekalahan mereka kepada seluruh cabang VSTP sebagai berikut: “Lantaran kerasnja reactie maka kita mendjadi lemah dalam ini perlawanan. Djadi sekarang kita mengakoe teroes terang, dengan ini pemogokan ta’ mendapat hatsil.” Dalam perundingan dengan *verzoeningsraad* (dewan pendamai), mereka menghadapi kenyataan bahwa dewan itu hanya mengajukan saran-saran, dan hanya akan membenarkan bahwa pemogokan itu adalah pemogokan politik. Dalam perundingan itu *verzoeningsraad* juga minta kepada semua pemogok untuk memberikan keterangan-keterangan tentang: nama pemogok, jumlah gaji, tunjangan kemahalan, premi kerajinan bekerja, beratnya pekerjaan pegawai yang bersangkutan, orang-orang yang dilepas karena *bezuiniging* (penghematan). Permintaan *verzoeningsraad* ini dijawab secara tertulis oleh pengurus VSTP bahwa mereka mau memberi keterangan, jika semua pemogok dapat dipekerjakan kembali dengan peraturan pekerjaan yang lama (*Vereeniging van Spoor en Tramweg-Personeel in Nederlandsch-Indië*, 1923.). Setelah itu, ratusan orang telah diterima untuk bekerja kembali, ribuan orang dipecat, dan pengurus pusat VSTP harus mengakui bahwa hal itu tidak dapat dihindari. Sekali lagi dengan nada melemah, pengurus VSTP menyatakan:

“Kita tidak bisa berboeat apa-apa, karena kaki dan tangan kita diikat. Kita tidak boleh berbitjara, kita akan lapar dan tidak lagi mendapat simpati dari saudara-saudara kita” (Buletin Pengurus Pusat VTSP; Ingleson, *op.cit.* 250).

E. SIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat dipetik kesimpulan bahwa kegagalan tuntutan buruh untuk perbaikan nasib sering disebabkan oleh cara-cara pengusaha untuk melumpuhkan daya tahan kaum pemogok dengan memanfaatkan *strike breaker* (tenaga pengganti kaum pemogok). Dengan demikian, selama pemogokan perusahaan tetap dapat beroperasi, sedangkan kaum pemogok, karena lemahnya kekuatan ekonomis dan organisasi mereka, terpaksa menerima kekalahan dengan bekerja kembali pada kondisi kerja yang lama.

Campur tangan negara yang sering berpihak kepada pengusaha membuat kaum pemogok tidak berdaya, karena keberpihakan itu dilembagakan secara hukum dan dapat digunakan untuk menghukum siapa saja yang dianggap melanggarnya.

Perkembangan kapitalisme yang eksploitatif telah melahirkan kelas-kelas sosial yaitu kelas yang menguasai modal atau alat-alat produksi, dan kelas buruh

yang sebagian besar adalah orang bumiputera yang miskin. Pengalaman bersama kaum buruh bumiputera di bawah sistem kapitalisme yang eksploitatif yang tercermin pada rendahnya tingkat upah dan kesejahteraan, rendahnya posisi pekerjaan, dan perlakuan tidak adil dalam hubungan produksi merupakan basis kemunculan kesadaran kelas buruh akan nasib dan kedudukannya dalam lingkup masyarakat industrial dan kolonial.

Nasionalisme menjadi kekuatan penting yang mendorong kaum buruh untuk memperjuangkan perbaikan kondisi kerja dan kesejahteraan dalam lingkup masyarakat industrial dan kolonial. Jika John Ingleson (1986:326) memandang bahwa golongan intelektual di kota-kota menjadi pelopor pergerakan nasional, dan Takashi Shiraishi (1992:342) menempatkan para pemimpin organisasi atau partai seperti Tjokroaminoto, Soerjopranoto, H. Agoes Salim sebagai pahlawan nasionalis, penelitian ini menunjukkan fenomena bahwa massa buruh bumiputera pun menjadi pelopor nasionalisme. Ketika terjadi pemogokan, solidaritas mereka sangat tinggi. Gejala tersebut dapat diketahui dari kondisi bahwa majikan-majikan Eropa mengalami kesulitan untuk mencari pengganti pemogok bumiputera. Nasionalisme buruh bumiputera juga tampak ketika ada rapat-rapat umum. Meskipun sering kali mereka

harus berdesakan karena keterbatasan tempat, mereka menghadiri rapat-rapat umum itu dengan penuh antusias untuk menemukan jalan guna memperjuangkan perbaikan nasib orang bumiputera. Walaupun ketika itu pengertian nasionalisme masih hanya dipahami oleh sekelompok kecil intelektual, gejalanya sudah dapat disaksikan di kalangan kaum buruh, kaum “kromo” yang miskin, dan hanya mempunyai tenaga untuk dijual pada kapitalis baik swasta maupun pemerintah.

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa pada awal abad ke-20, telah berkembang berbagai bentuk nasionalisme Indonesia, yaitu:

1. *Nasionalisme kultural*, antara lain Budi Utomo dan Taman Siswa. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta. Pada awal terbentuknya, Budi Utomo bersifat etnis dan kultural, yang tercermin dari tujuannya untuk memajukan pendidikan orang Jawa dan kultur Jawa dengan mengombinasikannya dengan kultur Barat. Taman Siswa didirikan pada tahun 1922 oleh Suwardi Surjaningrat, seorang kerabat istana Paku Alam, salah seorang dari “tiga serangkai”: dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, Douwes Dekker, dan Suwardi Surjaningrat. Taman Siswa adalah suatu lembaga yang

bertujuan untuk mengembangkan pendidikan dan kultural, menyediakan tempat persemaian golongan nasionalis.

2. *Nasionalisme etnis*. Contoh nasionalisme etnis adalah Perkumpulan Pasundan (1914), Persatuan Minahasa (1927), Sarekat Celebes (1930), Moluks Politiek Verbond (1929) dan lain-lain. (Suhartono, 1994:99-100).
3. *Nasionalisme religius*. Nasionalisme religius timbul di kalangan orang Indonesia yang menganggap Islam sebagai identitas mereka, tempat mereka membangsakan diri (Sarekat Islam, Persatuan Muslimin Indonesia, dan Muhammadiyah) (Noer, 1980:319-320, 329)..
4. *Nasionalisme sekuler*. Nasionalisme sekuler atau netral agama berkembang di kalangan kaum intelektual, produk pendidikan Barat. Pikiran politik nasionalis sekuler tidak mengekspresikan penghayatan ajaran agama (Partai Nasinal Indonesia (PNI), Perhimpunan Indonesia (PI), Pendidikan Nasional Indonesia, Partai Indonesia Raya) (Noer, *ibid.*).
5. *Nasionalisme pemuda*. Misalnya Tri Koro Darmo yang berubah menjadi Jong Java (1918), Jong Sumatranen Bond (1917), Jong Minahasa (1918), Jong Celebes, Jong Ambon, Jong

Minahasa, Jong Islamieten Bond dan lain-lain (Suhartono, *op. cit.*, 99-100).

Penelitian ini menemukan sisi lain komponen nasionalisme yaitu "nasionalisme buruh". Pada perempat pertama abad ke-20, pergerakan buruh telah menjadi bagian dari proses terbentuknya nasionalisme Indonesia. Kaum buruh bumiputera yang sering dipandang sebagai kaum "kromo" yang dipinggirkan secara sosial, ekonomi, dan politik, ternyata mempunyai kekuatan penting dalam pergerakannya, yaitu "nasionalisme buruh". Pada saat itu *nation* Indonesia masih merupakan *imagined community*, yang dalam penjelasan Benedict Anderson (1983:15) berarti *nation* adalah komunitas politik yang terbatas dan berdaulat yang diangankan, dan suatu bangsa tidak mungkin mengenal seluruh warganya, tidak mungkin saling bertemu, atau saling mendengar, dan yang ada dalam pikiran masing-masing anggota komunitas adalah hanya angan-angan atau gambaran tentang komunitas mereka. Suatu bangsa dapat terbentuk, jika sejumlah besar warga dalam suatu komunitas mau menetapkan diri sebagai bangsa yang mereka angankan. Meskipun Indonesia masih merupakan *imagined community*, keberpihakan pada bangsa sudah menjadi bagian dari spirit pergerakan buruh di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

I. Penerbitan dan Disertasi

- Anderson, Benedict, R. O'Gorman, *Imagined Communities Reflections on The Origin and Spread of Nationalism*, Thetford, Norfolk: Thetford Press Limited, 1983.
- Ari Dwipayana, AAGN., *Kelas dan Kasta Pergulatan Kelas Menengah di Bali*, Yogyakarta: Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, 2001.
- Baars, A. "Het eerste resultaat. Ontwerp Beginselverklaring", dalam *Het Vrije Woord*, No. 2, 20-10-1917.
- Bijblad op Het Staatsblad van Nederlandsch-Indië*, Deel XLVIII, No.7848-7979, Batavia: Landsdrukkerij.
- Blumberger, J. Th. Petrus, *De Nationalistische Beweging in Nederlandsch – Indië*, Dordrecht Holland / Providence-U.S.A.: Foris Publications, 1987.
- Breman, Jan, *Koelies, Planters en Koloniale Politiek*, Foris Publications: Dordrecht-Holland/Providence-U.S.A, 1987.
- Brewer, Anthony, *Kajian Kritis Das Kapital Karl Marx*, Jakarta: Teplok Press, 1999.
- Brommer, B., A. Sidharta, E. Budihardjo, A. Siswanto, A.B. Montens, Soewarno, S. Setiadi, Th. Stevens, *Semarang Beeld van Een Stad*, Purmerend: Asia Maior, 1995.
- Budiman, Amen, "Oei Tiong Ham", dalam *Suara Merdeka*, 23-7-1976.
- Budiman, Amen, "Semarang Pada Masa Penjajahan Inggris", dalam *Suara Merdeka*, Jum'at, 8 Agustus 1975.
- _____, "Masyarakat Pribumi Semarang Tempo Doeloe", dalam *Suara Merdeka*, Jum'at, 16 Januari 1976.
- _____, "Masyarakat Eropah Waktu Itu", dalam *Suara Merdeka*, Jum'at, 30 Januari 1976.
- _____, "Masyarakat Pecinan Semarang Tahun 1850-an, dalam *Suara Merdeka*, Jum'at, 23 Januari 1976.
- _____, *Semarang Riwayatmu Dulu*, Semarang: Penerbit Tanjung Sari, 1978.
- Burke, Peter, *History and Social Theory*, Cambridge: Polity Press, 1992.
- Carey, Peter, *Orang Jawa dan Masyarakat Cina (1755-1825)*, terjemahan oleh Pustaka Azet, Jakarta: Pustaka Azet, 1985.
- Chalid, Pheni, "Industrialization and the Labour Movement. A Study of Labour Unrest in the Export Processing Zone of Jakarta", unpublished dissertation, Bielefeld, 1997.
- Chandler Jr, Alfred D., *Scale and Scope The Dynamics of Industrial Capitalism*, Cambridge, Massachusetts, London, England: The Belknap Press of Harvard University Press, 1994.
- Cobban, L., "Kampungs and Conflict in Colonial Semarang", dalam *Journal of Southeast Asian Studies* Vol. XIX No. 2, 1988.
- De Graaf, H.J., *Cina Muslim di Jawa Abad XV dan XVI antara Historisitas dan Mitos*, terjemahan oleh Alfajari, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1998.
- De Winter, Tinus, dkk. (red.), *Internationaal Socialisme*, Rotterdam: Van Lambaart/Gramo, 1984.
- Dick, H.W., "The Emergence of National Economy, 1808-1990s", dalam J.Th. Lindblad (ed.), *Historical Foundations of a National Economy in Indonesia, 1890s-1990s*, North-Holland, Amsterdam/Oxford/New York/Tokyo, 1996.
- Donald, James & Stuart Hall (ed.), *Politics and Ideology* Philadelphia: Open University Press, 1986.
- Effendi, Sofyan, *Hukum Perburuhan Indonesia Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan-*

- peraturan, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Ensiklopedi Indonesia*, 1980, Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve.
- Gedenkboek der Gemeente Semarang 1906-1931*. Semarang: N.V. Dagblad De Locomotief.
- Gedenkschrift Uitgegeven door de Stadsgemeente Semarang ter Gelegenheid van Het 25-jarig Bestaan van Nieuw-Tjandi*. November 1939.
- Goodman, Jordan, & Katrina Honeyman, *Gainful-Pursuits – The Making of Industrial Europe 1600-1914*, London-New York-Melbourne-Auckland: A Division of Hodder & Stoughton, 1988.
- Gurr, Ted Robbert, *Why Men Rebel*, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1970.
- Handboek voor Cultuur en Handelsverenigingen in Nederlandsch-Indië*, 1926.
- Hasibuan, Sayuti, *Political Unionism and Economic Development in Indonesia: Case Study, North Sumatra*, University of California, 1960.
- Ingleson, John, *In Search of Justice Workers and Unions in Colonial Java, 1908-1926*, Singapore, Oxford, New York: Oxford University Press, 1986.
- _____, *Jalan Ke Pengasingan: Pergerakan Nasional Indonesia 1927-1934*. Jakarta: LP3ES, 1988.
- Indische Industrie. Speciaal Uitgave van De Locomotief*. 1931.
- Inlandsche Pers Overzicht* No. 4/1920.
- Indische Staatsblad* 1923 No. 222, Jo. 483.
- Kunio, Joshihara, *Konglomerat Oei Tiong Ham: Kerajaan Bisnis Pertama di Asia Tenggara*, Jakarta: PT Utama Grafiti, 1991.
- _____, (ed.), *Sarekat Islam Lokal*. Jakarta: Arsip Nasional RI, 1975.
- Kartodirdjo, Sartono (ed.), *Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Tengah)*. Jakarta: Arsip Nasional RI, 1977.
- _____, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- _____, & Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia Kajian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, 1991.
- Kartonegoro, Sentanoe, *Hubungan Industrial Hubungan Antara Pengusaha dan Pekerja (Bipartit) dan Pemerintah (Tripartit)*, Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, 1999.
- Katalogus Surat Kabar Koleksi Perpustakaan Museum Pusat 1810-1973*, Jakarta, 1973.
- Keller, Suzanne, *Beyond The Ruling Class Strategic Elites in Modern Society*, London: Random House, Inc., 1963.
- Koloniaal Verslag van 1915*.
- Keyzer, S. (ed.), *François Valentijn's Oud en Nieuw Oost-Indië*, Amsterdam: Wed. J.C. Van Kesteren & Zoon, 1862.
- Kwantes, R.C. (ed.), *De Ontwikkeling van De Nationalistische Beweging in Nederlandsch-Indië*, Bronnen Publikatie, Eerste Stuk: 1917-medio 1923. Groningen: Tjeenk Willink and Wolters Noordhoff, 1978.
- _____, *De Ontwikkeling van De Nationalistische Beweging in Nederlandsch-Indië*, Bronnen Publikatie. Tweede Stuk. 1923-1928. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1978.
- _____, *De Ontwikkeling van de Nationalistische Beweging in Nederlandsch-Indië*, Bronnen Publikatie. Vierde stuk, 1933-1942. Groningen: Wolters Noordhoff/Bouma's Boekhuis, 1982.
- Larson, George D., *Prelude to Revolution Palaces and Politics in Surakarta 1912-1942*, Dordrecht-Holland/Providence U.S.A.: Foris Publications, 1987.
- Leertouwer, W., *Semarang als Industrieel, Commercieel en Cultureel Centrum*, Semarang: Administratiekantoor A.C. Van Pernis, 1941.

- Liem Thian Joe, *Riwayat Semarang 1416-1931 (Dari Dzamannja Sam Poo Sampe Terhapoesnja Kong Koan)*, Semarang, 1933.
- Liem Tjwan Ling, "Raja Gula: Oei Tiong Ham, dalam Yoshihara Kunio (penyunting), *Konglomerat Oei Tiong Ham Kerajaan Bisnis Pertama di Asia Tenggara*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1991.
- Locher-Scholten, Elisabeth Bodine, *Ethiek in Fragmenten- Vijf Studies over Koloniale Denken en Doen van Nederlanders in de Indonesische Archipel 1877-1942*, Utrecht: Hes Publishers, 1981.
- Lohanda, Mona, *The Capitan Cina of Batavia 1837-1942*, Jakarta: Djambatan, 1996.
- McVey, Ruth T., *The Rise of Indonesian Communism*, Ithaca, New York: Cornell University Press, 1965.
- Magnis-Suseno, Frans, *Pemikiran Karl Marx Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Malaka, Tan, *Madilog Materialisme, Dialektika, Logika*, Jakarta: Pusat Data Indikator, 1991.
- _____, *Aksi Massa*. Jakarta: Teplok Press, 2000.
- Muhammad, Djawahir (ed.), *Semarang Sepanjang Jalan Kenangan*, Semarang: PENDA DATI II Semarang-Dewan Kesenian Jawa Tengah-Aktor Studio, 1995.
- Mustain, "Gerakan Petani di Pedesaan Jawa Timur Pada Era Reformasi Studi Kasus Gerakan Reclaiming Oleh Petani Atas Tanah Yang dikuasai PTPN XII Kalibakar, Malang Selatan", disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2004.
- Nas, Peter J.M., *The Indonesian City, Studies in Urban Development and Planning*, Dordrecht-Holland: Foris Publications, 1986.
- Noertjahjo, A.M., *Cerita Rakyat Sekitar Wali Songo*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1963.
- Onderzoek naar De Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera. Overzicht van De Uitkomsten der Gewestelijke Onderzoekingen naar De Inlandschen Handel en Nijverheid en Daaruit Gemaakte Gevolgtrekkingen, 1909*. Batavia: H.M. Van Dorp & Co.
- Parekh, Bhikhu, *Marx's Theory of Ideology*, London: Croom Helm Ltd., 1982.
- Parker, S.R., R.K. Brown, J. Child, M.A. Smith, *Sosiologi Industri*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Pemerintah Daerah Kotamadya Semarang, *Sejarah Kota Semarang*, 1979.
- Poeze, Harry A., *Tan Malaka Strijder voor Indonesische Vrijheid Levensloop van 1897 Tot 1945*, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1976.
- Poloma, Margaret M., *Sosiologi Kontemporer*. Yogyakarta: Yayasan Solidaritas Gadjah Mada, t.t.
- Post, Peter & Elly Touwen-Bouwsma, *Japan Indonesia and The War*, Leiden: KITLV Press, 1997.
- Pringgodigdo, A.K., *Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia*, Djakarta: Pustaka Rakjat, 1961.
- Rahardjo, M. Dawam, *Esei-Esei Ekonomi Politik*. Jakarta: LP3ES, 1983.
- Rahardjo, M. Dawam, "Gerakan Rakyat dan Negara" dalam *Prisma II, Tahun XIV*, 1985..
- Riff, Michael A. (ed.), *Kamus Ideologi Politik Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- R. Popper, Karl, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-musuhnya*, terjemahan dari "The Open Society and Its Enemies", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Ricklefs, M.C., *A History of Modern Indonesia*, Houndmills, Basingstoke, Hampshire RG21 and London: Mcmillan Education LTD, 1981.

- Sandra, *Mogok dan Pemogokan*, Jakarta: Pancaroba, 1955.
- , *Sedjarah Pergerakan Buruh Indonesia*. Djakarta: P.T. Pustaka Rakjat, 1961.
- Semaoen, *Penoentoen Kaoem Boeroeh dari Hal Sarekat Sekerdja* Semarang, 1920.
- Semarangsche Ambachtsschool. School voor Opzichters en Machinisten Over het Jaar 1913*, Semarang: Co. Semarang-Soerabaia.
- Semarang-Joana Stoomtram Maatschappij Verslag over Het Jaar 1919*.
- Shiraishi, Takashi, *An Age in Motion Popular Radicalism in Java, 1912-1926*, Ithaca and London: Cornell University Press, 1990.
- Sills, David L. (ed.), *International Encyclopedia of the Social Sciences*, volume 8, U.S.A.: Crowell Collier and Macmillan, Inc., 1968.
- Skocpol, Theda, *Vision and Method Historical Sociology*, Cambridge: Cambridge University Press, 1984.
- Smelser, Neil J., *Theory of Collective Behaviour*, New York: The Free Press, 1962.
- Soe Hok-Gie, *Di Bawah Lentera Merah Riwayat Sarekat Islam Semarang 1917-1920*, Jakarta: Frantz Fanon Foundation, 1990.
- Soekirno, *Semarang*, Semarang: Djawatan Penerangan Kota Besar Semarang, 1956.
- Suroto, Suri, “Gerakan Buruh dan Permasalahannya” dalam *Prisma II*, tahun XIV, 1985.
- Suryo, Djoko, *Sejarah Sosial Pedesaan Karesidenan Semarang 1830-1900*. Yogyakarta: PAU Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, 1989.
- Susetiawan, *Konflik Sosial Kajian Sosiologis Hubungan Buruh, Perusahaan dan Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Tichelman, F., *Socialisme in Indonesië De Indische Sociaal Democratisch Vereeniging 1897 – 1917*, Dordrecht-Holland/Cinnaminson-U.S.A.: Foris Publications, 1985.
- Thee Kian Wie, *Industrialisasi Indonesia, Analisis dan Catatan Kritis*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1988.
- Tollenaere, De, en A.J. Persijn, *Van Dale Nieuw Handwoordenboek der Nederlandse Taal*. ‘s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1977.
- Tramwegen Op Java. Gedenkboek Samengesteld der Gelegenheid van Het Vijf en Twintig-jarig Bestaan der Semarang-Joana Stoomtram-Maatschappij*. ‘s-Gravenhage: Kon. Ned. Boek-en Kunsthandel van M.M. Couvee.
- Yuliati, Dewi, “Industrialisasi di Semarang (1906-1930) dalam *Lembaran Sastra* No. 23 Tahun 1997. Semarang: Fakultas Sastra Univ. Diponegoro, 1997.
- , *Semaoen, Pers Bumiputera dan Radikalisasi Sarekat Islam Semarang*. Semarang: Bendera, 2000.
- Van Dijk, Kees, “The Threefold Suppression of the Javanese The Fight against Capitalism, The Colonial State, and The Traditional Rulers”, dalam Robert Cribb. *The Late Colonial State in Indonesia Political and Economic Foundations of The Netherlands Indies 1880-1942*, Leiden: KITL Press, 1994.
- Verslag Van De Toestand Der Gemeente Semarang Over 1915*.
- Verslag Van De Toestand Der Gemeente Semarang Over 1917*.
- Verslag Van De Toestand Der Gemeente Semarang Over 1926*.
- Verslag van De Toestand der Gemeente Semarang Over 1927*.
- Verslag Van De Handelsvereniging Te Semarang*, 1916.
- Verslag Van De Kamer van Koophandel en Nijverheid Te Semarang Over Het Jaar 1910*.
- Wal, S.L. van der (ed.), *De Opkomst van de Nationalistische Beweging In Nederlands-Indie*, Groningen, 1967.

- _____, *De Volksraad en de Staatskundige Ontwikkeling van Nederlands-Indië*, Groningen: J.B. Wolters, 1964.
- Weber, Max, *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*, Surabaya: Pustaka Prometheus, 2000.
- Wertheim, W.F., *Masyarakat Indonesia dalam Transisi Studi Perubahan Sosial*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1999.
- _____, (ed.), *The Indonesian Town Studies in Urban Sociology*, The Hague: W. Van Hoeve Ltd. 1958.
- Westerveld, D.J., "Woning Toestanden onder de Javaansche Bevolking te Semarang", dalam *Gemeentebled Semarang 1914*.
- Wilkinson, Paul, *Social Movement*, London: Pall Mall Press Ltd., 1971.

II. Arsip

- Algemeen verslag* residen Semarang tahun 1918.
- Buletin Pengurus Pusat VSTP, terlampir dalam surat residen Semarang kepada Gubernur Jenderal, 8 Juni 1923, Vb. 24 Agustus 1924-24.
- Centrale Leiding van De Spoor en Tramweg Staking in Nederlandsch-Indië, Semarang, *Djangan Toendoek Kepala!! Awas, awas!! Madjoe teroes!! Djangan moendoer!!*, 10 Mei 1923; Koleksi Algemeene Rijks Archief, nomor inventaris 144-VSTP Semarang 1923.
- Koloniaal Verslag* 1917, 1918, 1919.
- Mr. 501 x/1924.
- Mr. 101x/1923.
- Mr. 893x/1925.
- Makloemat VSTP* (Semarang: Drukkerij V.S.T.P.), t.t.; Koleksi Algemeen Rijks Archief di Den Haag, Nomor inventaris 144-VSTP Semarang 1923.
- "Politiek Overzicht 1925", dalam *Bijlage Algemeen Verslag*, resident van Semarang, Februari 1927.
- Surat Edaran VSTP, *SANGET PENTING*. Semarang: Drukkerij VSTP. 23

April 1923. Koleksi Algemeen Rijks Archief di Den Haag, nomor inventaris 144 – VSTP Semarang 1923.

- Vb. 8 September 1917.
- Vb. 14 Juli 1923.
- Vb. 23 December 1925.
- Vb. 30 Januari 1926.

III. Surat Kabar

- Api*, 24 Desember 1924.
- Api*, 22 Juli 1925.
- Api*, 29 Agustus 1925.
- De Indiër*, 19 Maret 1917.
- De Locomotief*, 18 Maret 1913.
- De Locomotief*, 3 Agustus 1925.
- De Locomotief*, 4 Agustus 1925.
- De Locomotief*, 1 September 1925.
- De Volharding*, 20 April 1917.
- Het Vrije Woord*, No. 2, 20 Oktober 1917.
- Kan Po*, No. 1, bulan 8 – 2602, hlm. 33.
- Sinar Djawa*, 15 Juli 1914.
- Sinar Djawa*, 12 Februari 1918.
- Sinar Djawa*, 27 Februari 1915.
- Sinar Djawa*, 3 Agustus 1917.
- Sinar Djawa*, 25 Oktober 1917.
- Sinar Djawa*, 22 Desember 1917
- Sinar Djawa* 19 Januari 1918.
- Sinar Djawa*, 12 Maret 1918.
- Sinar Djawa*, 27 April 1918.
- Sinar Hindia*, 19 November 1918
- Sinar Hindia*, 14 Januari 1919.
- Sinar Hindia*, 20 Februari 1920.
- Sinar Hindia*, 25 Februari 1920.
- Sinar Hindia*, 14 April 1920.
- Sinar Hindia*, 5 Mei 1920.
- Sinar Hindia*, 16 Januari 1922.
- Sinar Hindia*, 21 Januari 1922.
- Sinar Hindia*, 22 Januari 1922.
- Sinar Hindia*, 23 Januari 1922.
- Sinar Hindia*, 22 Maret 1922.
- Sinar Hindia*, 5 Mei 1923.
- Sinar Hindia*, 8 Mei 1923.
- Sinar Hindia*, 12 Mei 1923.
- Sinar Hindia*, 12 Maret 1924.
- Sinar Hindia*, 2 Mei 1924.
- Si Tetap*, 31 Oktober 1925.
- Si Tetap*, 30 November 1925.
- Si Tetap*, April – Mei 1926.

Si Tetap, Agustus-September 1926
Soeara-Bekelai *Orgaan* *Vakcentrale*:
Persatoean Perkoempoelan Kaoem
Boeroeh Hindia, 29-2-1920.
Soeara-Bekelai *Orgaan* *Vakcentrale*:
Persatoean Perkoempoelan Kaoem
Boeroeh Hindia, 30-4-1920.

Soeara-Bekelai *Orgaan* *Vakcentrale*
Persatoean Perkoempoelan Kaoem
Boeroeh Hindia, 30 April 1920.
Soeara-Bekelai *Orgaan* *Vakcentrale*
Persatoean Perkoempoelan Kaoem
Boeroeh Hindia, 31 Juli 1920.